

PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017)

Aqidatul Firly*, Nur Diana, M. Cholid Mawardi*****

aqidatulfirly@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this study is to give empirical evidence about the impact of local income, the size of local government, the complexity of local government, and regional expenditure on the level of disclosure of financial statements on the website of regional governments. The sample of this study is the regional government of East Java which discloses the financial statements of local governments on the websites of each local government during 2015-2017, namely as many as 20 local governments. The data analysis method used is logistic regression, because the dependent variable in this study is dummy variable. The results showed that partially the original income variable, local government size, and regional expenditure had a significant positive effect on the level of disclosure of financial statements on the local government website. While the complexity of regional government does not have a significant effect on the level of disclosure of regional financial reports on the local government website. The magnitude of the influence of local revenue, the size of local government, the complexity of local government, and regional expenditure on the level of disclosure of regional financial statements on the local government website is 54%, while the remaining 46% is explained by other variables outside of this regression model.

Keywords: *Level Of Financial Statement Disclosure, Local Income, Size Of Local Government, Local Government Complexity, Regional Expenditure.*

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah adalah salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban lembaga pemerintah untuk bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban berkala (Bastian, 2002). Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik yang mengatur bahwa “Pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientasi kepada pelayan masyarakat, yang sudah sepatutnya Pemerintah daerah melaporkan hasil kinerja keuangannya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi informasi”. Untuk pemenuhan kewajiban pelaporan mengenai informasi keuangan tersebut, Pemerintah daerah dapat memanfaatkan internet sebagai media dalam penyampaian laporan keuangan (*Internet Financial Reporting*) kepada masyarakat karena di era globalisasi dan digitalisasi ini internet dinilai sangat mudah dijangkau oleh masyarakat dan juga memiliki biaya yang lebih rendah. (Hadis, 2018).

Hampir semua Pemerintah daerah di Indonesia memiliki *website*, dengan kualitas *website* dan peranan yang berbeda. Namun, nyatanya sampai saat ini berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan, mayoritas Pemerintah daerah belum mentaati implementasi peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik dan Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tentang kualitas pelaporan informasi keuangan tersebut sepenuhnya atau dengan kata lain belum bersikap transparan, tidak terkecuali Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Menurut koordinator Forum Transparansi Pengelolaan Anggaran (FITRA) Jawa Timur A. Dahlan, “Kendati sudah lama diberlakukan, sejumlah daerah belum mematuhi instruksi tersebut (publikasi laporan keuangan pemerintah daerah).” Fakta tersebut diperkuat dengan ditemukannya beberapa daerah terbukti belum mempublikasikan dokumen keuangan di laman *website* masing-masing pemda. (www.kumparan.com). Di samping itu, laporan *Corruption Perceptions Index* 2015 mengungkapkan bahwa Indonesia juga masih menempati peringkat ke-88 dari total 168 negara yang diukur, dimana Indonesia hanya memiliki skor sebesar 36 dari 100 poin tertinggi (*Transparency International*, 2016).

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda ?
2. Apakah ukuran Pemda berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda ?
3. Apakah kompleksitas pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda ?
4. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda ?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Pemerintah daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas Pemerintah daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda, dan
4. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Penelitian Terdahulu

Hadis (2018) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam *Website* Pemda (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2012- 2014). Digunakan variabel dependen yang berupa pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda dan variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran Pemerintah daerah, kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan pada *website* pemerintah daerah, dan belanja daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website* Pemerintah daerah.

b. Teori Agensi

Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*prinsipal*) memberikan manajemen perusahaan kepada tenaga profesional (*agen*) lebih paham akan bisnis (Sutedi, 2012:13). Hubungan antara *principal* dan *agen* juga terjadi di dalam pemerintahan yaitu antara rakyat dan pemerintah pusat sebagai *prinsipal* dan pemerintah daerah sebagai *agen*, pemerintah daerah harus memberikan akuntabilitas, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya. Dalam menjalankan akuntabilitas, kewajiban dari organisasi sektor publik sebagai pemenuhan hak publik adalah memberikan informasi (Mardiasmo, 2009 : 21).

c. Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.” Informasi ini disediakan sebagai bentuk transparansi, yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan hak masyarakat untuk secara terbuka dan komprehensif mengetahui sumber daya yang dikelola pemerintah untuk dipercayakan kepada pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan (KNKG, 2008).

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan sebagai pengukur Kinerja Pemerintah Daerah. Semakin besar PAD

maka kinerja Pemerintah daerah semakin baik, begitu pula sebaliknya. Laswad et.al (2005) dan Medina (2012) menemukan dalam penelitiannya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet (*website*). Amalina (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa PAD berpengaruh signifikan terkait kinerja pemerintah. Semakin baik kinerja pemerintah, semakin tinggi pula tingkat pengungkapannya. Dalam hal ini PAD digunakan sebagai pengukur kekayaan suatu daerah.

e. Belanja Daerah

Menurut PSAP No. 2, Paragraf 7, “Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah”. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, jika semakin tinggi belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya masyarakat semakin mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah. Mengacu kepada hal tersebut maka keinginan pemerintah untuk mengungkapkan laporan keuangannya akan semakin tinggi.

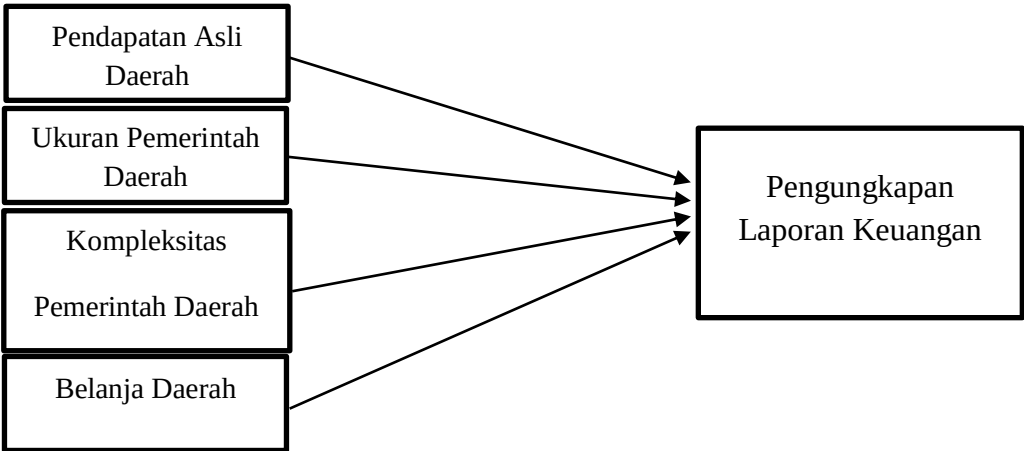
f. Ukuran Pemda

Laswad et.al. (2005) mengkaitkan kinerja terhadap *internet financial reporting* dengan ukuran pemerintah daerah. Internet adalah media yang efektif dan efisien yang dapat digunakan dalam mengungkapkan informasi bagi pemerintah daerah kepada masyarakat karena biaya pengungkapan informasi melalui internet tidak akan dipengaruhi oleh besarnya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Ettredget.al., 2002). Semakin besar ukuran pemda akan semakin memotivasi pemerintah daerah yang bersangkutan mempublikasikan laporan keuangannya.

g. Kompleksitas pemda

Menurut Pasal 28 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, “Besarnya penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah”. Oleh sebab itu besarnya populasi penduduk, akan mempengaruhi besarnya tuntutan terhadap pengungkapan yang dilakukan pemerintah mengingat fungsi pemerintah sebagai pemegang amanah masyarakat. Besarnya populasi penduduk akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan informasi yang mereka berikan dalam laporan keuangan mereka. Penelitian Rora (2010) dan Hilmi (2010) menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan Pemerintah daerah.

3. KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1. Kerangka Konseptual

4. HIPOTESIS

- H₁ : Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemda dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan
- H_{1a} : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan
- H_{1b} : Ukuran Pemda berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan

- H_{1c} : Kompleksitas Pemda berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan.
H_{1d} : Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan

5. METODE PENELITIAN

a. Jenis, Lokasi, dan Waktu penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan lokasi penelitian yang dilakukan di Pemerintah daerah Se-Jawa Timur dengan mengakses di www.bpkp.go.id, www.djpk.kemenkeu.go.id, serta situs resmi dari masing-masing daerah. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai bulan Juli 2019.

b. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Timur. Sementara untuk sampel digunakan metode pengambilan sampel yang dilakukan secara *purposive sampling*. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2015-2017.
2. Ketersediaan akses terhadap *website* resmi Pemerintah Daerah pada waktu penelitian.
3. Yang memberikan informasi mengenai variabel yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinyatakan dengan satuan rupiah dan di proksikan dengan rumus sebagai berikut :

$$Rasio\ PAD = \left(\frac{total\ PAD}{total\ Pendapatan} \right) \times 100\%$$

Belanja Daerah

Dalam penelitian ini Belanja Daerah dinyatakan dengan satuan rupiah menggunakan indikator sebagai berikut :

$$Belanja\ Daerah = Ln (Total\ Belanja\ Daerah)$$

Ukuran Pemerintah Daerah

Variabel ukuran pemerintahan daerah ini di proksikan dengan total aset yang dimiliki Pemerintah daerah dalam satuan rupiah. Dalam penelitian ini variabel ukuran pemda menggunakan indikator :

$$Ukuran\ Pemda = Ln (Total\ Aset\ Pemda)$$

Kompleksitas Pemerintah Daerah

Variabel Kompleksitas Pemda dinyatakan dalam satuan penduduk menggunakan indikator :

$$Kompleksitas\ Pemda = Ln (Total\ Populasi\ Penduduk)$$

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam riset ini adalah analisis regresi logistik dengan memakai SPSS. Penggunaan analisis regresi logistik dalam penelitian ini dikarenakan regresi logistik adalah suatu pendekatan dalam membuat persamaan prediksi yang variabel dependennya adalah data dikotomi. Model regresi yang digunakan pada penelitian ini dengan formula sebagai berikut:

$$Ln \left(\frac{TP}{1-TP} \right) = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 UPD + \beta_3 KPD + \beta_4 BD + e$$

Keterangan :

- $Ln \frac{TP}{1-TP}$: Logaritma natural dari probabilitas Y (Pengungkapan LKPD)
 - β_0 : Beta nol (Konstanta)
 - $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Beta variabel (koefisien Regresi)
 - PAD : Pendapatan Asli Daerah
 - UKD : Ukuran Pemerintah daerah
 - KPD : Kompleksitas Pemerintah daerah
 - BD : Belanja Daerah
 - e : error
- Dimana :

$[TP/(1-TP)] = Odds (LKPD|PAD,UKD,KPD,BD)$

Dengan demikian model regresi logistik menjadi seperti berikut ini :

$Ln [Odds (LKPD|PAD, UKD, KPD, BD)] = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 UKD + \beta_3 KPD + \beta_4 BD + e$

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh, populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur sebanyak 38 Kabupaten/Kota. sedangkan sampel yang di ambil menggunakan metode *purposive sampling* dengan hasil sebagai berikut :

NO	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2015-2017	38
2.	Website Pemerintah Daerah yang tidak bisa di akses	(6)
3.	Pemerintah Daerah tidak memiliki data secara lengkap berdasarkan variabel- variabel yang dibutuhkan dalam website Pemda.	(12)
	Pemerintah Daerah yang menjadi sampel penelitian.	20

b. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		PAD	Ukuran	Kompleks	Belanja
N		60	60	60	60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.2060	28.7868	13.7625	28.2563
	Std. Deviation	.12996	.87280	.77953	.48068
Most Extreme Differences	Absolute	.192	.111	.243	.129
	Positive	.192	.111	.114	.117
	Negative	-.169	-.100	-.243	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		.771	.858	.680	.997
Asymp. Sig. (2-tailed)		.591	.453	.744	.273

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, nilai *Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov (2-tailed)* variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,591, variabel ukuran pemerintah daerah memiliki *Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov (2-tailed)* sebesar 0,453, variabel kompleksitas

pemerintah daerah memiliki *Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov (2-tailed)* sebesar 0,744, dan nilai *Asymp. Sig. Kolmogorov-Smirnov (2-tailed)* variabel belanja daerah adalah sebesar 0,273, maka dapat dilihat bahwa hasil dari data-data yang diperoleh adalah lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

c. Analisis Regresi Logistik

Variables in the Equation						
	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a PAD	14.180	6.443	4.843	1	.028	1.439E6
UKD	1.383	.637	4.706	1	.030	3.985
KPD	-1.783	1.030	2.995	1	.084	.168
BD	3.848	1.818	4.481	1	.034	46.883
Constant	-125.788	45.934	7.499	1	.006	.000

a. Variable(s) entered on step 1: PAD, UKD, KPD, BD.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas maka persamaan regresi yang di dapat adalah sebagai berikut :

$$\ln [\text{Odds (LKPD|PAD,UKD,KPD,BD)}] = -125,788 + 14,180 \text{ PAD}_{(0,028)} + 1,383 \text{ UKD}_{(0,030)} - 1,783 \text{ KPD}_{(0,084)} + 3,848 \text{ BD}_{(0,034)} + e$$

d. Menilai Keseluruhan Model

Nilai -2LogL sebelum di masukkan variabel independen

Block 0: Beginning Block		
Iteration History ^{a,b,c}		
Iteration		Coefficients
		Constant
Step 0	1	80.762
	2	80.761
	3	80.761

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 80,761

Nilai -2LogL setelah di masukkan variabel independen

Block 1: Method = Enter

Iteration History ^{a,b,c,d}							
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients				
			Constant	PAD	UKD	KPD	BD
Step 1	1	54.822	-80.404	5.917	.941	-1.174	2.429
	2	50.942	-114.662	9.915	1.240	-1.712	3.582
	3	50.252	-126.012	12.661	1.336	-1.853	3.943
	4	50.166	-126.155	13.898	1.374	-1.803	3.880
	5	50.162	-125.798	14.170	1.382	-1.784	3.849
	6	50.162	-125.788	14.180	1.383	-1.783	3.848
	7	50.162	-125.788	14.180	1.383	-1.783	3.848

- a. Method: Enter
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 80,761
- d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Berdasarkan tabel diatas, model pertama (tabel Block 0:beginning block) yang hanya berupa konstanta dan belum dimasukkan variabel independen diperoleh nilai -2LogL sebesar 80,761 mengalami penurunan pada tabel Block 1 yaitu setelah dimasukkan variabel independen dengan nilai -2LogL sebesar 50,162. Penurunan ini menunjukkan bahwa model regresi baik untuk digunakan.

Tabel perbandingan nilai -2LogL

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	30.599	4	.000
	Block	30.599	4	.000
	Model	30.599	4	.000

Tabel diatas adalah tabel yang menunjukkan terdapat pengaruh secara simultan variabel dependen terhadap variabel independen. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Sig. model sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, dan belanja daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah.

e. Uji Hosmer and Lemeshow’s Test

Uji Hosmer and Lemeshow’s Test

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	Df	Sig.
1	12.317	8	.138

Berdasarkan hasil uji diatas di peroleh nilai *Chi-square* sebesar 12,317 dengan nilai sig. 0,138 sehingga dapat terlihat nilai sig. (12,317) > 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan antara model dengan observasinya, dengan kata lain model dapat diterima karena terdapat kecocokan dengan dengan observasinya. Hal ini berarti model layak untuk dipakai untuk analisis selanjutnya.

f. Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	50.162 ^a	.399	.540

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Dari tabel diatas menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Nagelkerke R Square*) adalah sebesar 54% yang menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, dan juga belanja daerah. Sedangkan sisanya sebesar 46% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

g. Uji Koefisien Regresi (*Nilai Wald*)

Variables in the Equation						
	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a PAD	14.180	6.443	4.843	1	.028	1.439E6
UKD	1.383	.637	4.706	1	.030	3.985
KPD	-1.783	1.030	2.995	1	.084	.168
BD	3.848	1.818	4.481	1	.034	46.883
Constant	-125.788	45.934	7.499	1	.006	.000

a. Variable(s) entered on step 1: PAD, UKD, KPD, BD.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa “variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai *Wald* sebesar 4,843 dengan signifikansi $0,028 < 0,05$, maka **H_{1a} diterima dan H₀ ditolak**, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel pendapatan asli daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah. sehingga semakin tinggi pendapatan asli daerah pada suatu pemerintah daerah maka akan meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah.”

Pada “variabel ukuran pemerintah daerah yang di gambarkan dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah memiliki nilai *Wald* sebesar 4,706 dengan signifikansi $0,030 < 0,05$, maka **H_{1b} diterima dan H₀ ditolak**, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel ukuran pemerintah terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah. Sehingga menunjukkan apabila semakin tinggi total aset pada suatu pemerintah daerah maka akan meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah.”

“Variabel kompleksitas pemerintah daerah yang digambarkan dengan total populasi penduduk yang dimiliki pemerintah daerah memiliki nilai *Wald* sebesar 2,995 dengan signifikansi $0,084 > 0,05$, maka **H_{1c} ditolak dan H₀ diterima**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh terhadap variabel tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah.”

Pada “variabel belanja daerah yang dimiliki pemerintah daerah memiliki nilai *Wald* sebesar 4,481 dengan signifikansi $0,034 < 0,05$, maka **H_{1d} diterima dan H₀ ditolak**, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan variabel belanja daerah terhadap variabel tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah. sehingga menunjukkan apabila semakin tinggi belanja daerah pada suatu pemerintah

daerah maka akan meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah.”

h. Matriks Kualifikasi

Classification Table ^a					
Observed			Predicted		
			Pengungkapan Laporan Keuangan di Website		Percentage Correct
			Tidak melaporkan	Melaporkan	
Step 1	Pengungkapan Laporan Keuangan di Website	Tidak melaporkan	20	4	83.3
		Melaporkan	8	28	77.8
Overall Percentage					80.0

a. The cutvalue is ,500

Dari hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa prediksi dari kemungkinan pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah sebanyak 36 pemerintah daerah selama 3 tahun, sedangkan observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang melakukan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah adalah sebanyak 28 pemerintah daerah dengan ketepatan model sebesar 77,8% (28/36). Sedangkan untuk kekuatan prediksi model pemerintah daerah yang tidak melakukan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah adalah sebesar 83,3% (20/24). Maka dengan menggunakan model regresi yang digunakan tersebut pemerintah daerah yang di prediksi tidak melakukan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah adalah sebanyak 24 pemerintah daerah selama 3 tahun, sedangkan observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang tidak melakukan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah adalah sebanyak 20 pemerintah daerah.

7. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, dan belanja daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di *website* pemerintah daerah di Jawa Timur periode 2015-2017.
2. Variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, dan belanja daerah secara bersama-sama berimplikasi 54% terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di *website* pemerintah daerah dan sebesar 46% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masukkan dalam model penelitian ini.
3. Secara parsial (individual) variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dan belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah. Sedangkan variabel kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah di *website* pemerintah daerah di Jawa Timur periode 2015-2017.

b. Keterbatasan

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas 3 tahun yaitu : 2015, 2016, dan 2017.
2. Variabel yang digunakan peneliti hanya 4 variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, dan belanja daerah.
3. Sampel penelitian hanya terbatas pada wilayah Jawa Timur saja sehingga tidak dapat dijadikan generalisasi untuk seluruh pemerintah daerah.

c. Saran

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian 3 tahun, maka peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan rentang waktu lebih panjang agar dapat mencerminkan kondisi yang lebih akurat.
2. Karena dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel bebas maka untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain, misalnya dana alokasi umum, umur penelitian, temuan audit, dan jumlah anggota DPRD.
3. Untuk penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan untuk menambah sampel selain pemerintah daerah di Jawa Timur, seperti pemerintah daerah provinsi lain dan juga pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

- Hadis, 2018. Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam Website Pemda (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatra Barat Tahun 2012-2014). *Skripsi* Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Hilmi, Amiruddin Zul. 2010. “Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi”. *Jurnal ASPAK No. 17 Universitas Indonesia*.
- Laswad, et al. 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy* 24. 101-121.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah No. 24. 2005. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Yudistisia.
- Sutedi, 2012, *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Roro Puspita dan Martani (2011), “Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda” Skripsi S1 Universitas Indonesia
<https://kumparan.com/wartabromo/potret-buram-transparansi-anggaran15508884623587>
- *) Aqidatul Firly Alumni Universitas Islam Malang
- **) Nur Diana Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang
- ***) M. Cholid Mawardi Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang